

BAB II

POTENSI KOTA BATAM DAN INVESTASI ASING DI BATAM

Pada bab II, penulis memaparkan terkait potensi Kota Batam dan investasi asing di Batam. Terdapat penjelasan mengenai kebijakan publik, ekonomi politik dan investasi asing di Indonesia, potret Kota Batam, mulai dari kondisi geografis dan geologis agar terlihat peluang Kota Batam yang menjadikannya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian, akan dilanjutkan dengan potensi dan peluang investasi di Kota Batam yang menjadikannya tujuan investasi dari berbagai sektor, seperti industri dan pariwisata dan bab ini akan diakhiri dengan pemaparan terkait investasi asing di Batam.

Meningkatnya suatu pertumbuhan investasi asing di Indonesia adalah dampak dari adanya liberalisasi perekonomian. Hal ini dimanfaatkan berbagai kalangan termasuk para pengusaha industri. Adanya modal asing dalam suatu perusahaan industri dimanfaatkan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia. Namun demikian, tentu ada implementasi kebijakan yang baik dan benar.

A. Kebijakan Publik

Kebijakan berarti alat atau instrument guna mengatur penduduk dari atas ke bawah dengan memberi penghargaan (*rewards*) dan *sanctions* kebijakan pula dapat diartikan sebagai *blueprint* dimana akan mempengaruhi perilaku banyak orang yang akan terkena dampak suatu keputusan yang dibuat.²⁹ Kebijakan publik merupakan studi tentang

²⁹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hlm. 19-20.

keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik.³⁰

1. Aktor dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik

Pembentukan suatu kebijakan tidak terlepas dari aktor-aktor yang turut mengambil keputusan dalam perumusannya. Menurut James Anderson, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan terbagi dua, yaitu para pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi.³¹

Pemeran serta resmi yakni : (1) Badan Badan Administrasi, biasanya menjadi sumber utama mengenai usul pembuatan undang-undang dalam sistem politik, tidak hanya menyarankan, badan-badan administrasi juga melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanan dalam menetapkan undang-undang. (2) Presiden, memegang peran penting dalam melakukan perumusan kebijakan karena sebagai kepala eksekutif, serta dapat dilihat dari adanya perumusan kebijakan dalam komisi-komisi presidensial ataupun rapat dalam kabinet.

Sementara, pemeran serta tidak resmi salah satunya adalah warga negara individu. Warga negara seringkali diabaikan dalam hubungannya dengan legislatif ketika kebijakan publik dalam proses pembuatan. Namun, dalam negara yang memiliki sistem otoriter kepentingan dan keinginan warga negara biasanya adalah akibat dari adanya kebijakan publik.

B. Ekonomi Politik

Pengaruh globalisasi di level lokal membawa kapitalisme masuk ke dalamnya. Globalisasi menjadi gerbang masuknya bagi negara-negara

³⁰ Surya Fermana, *Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), hlm. 34-35.

³¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Caps, 2014) hlm. 126-134.

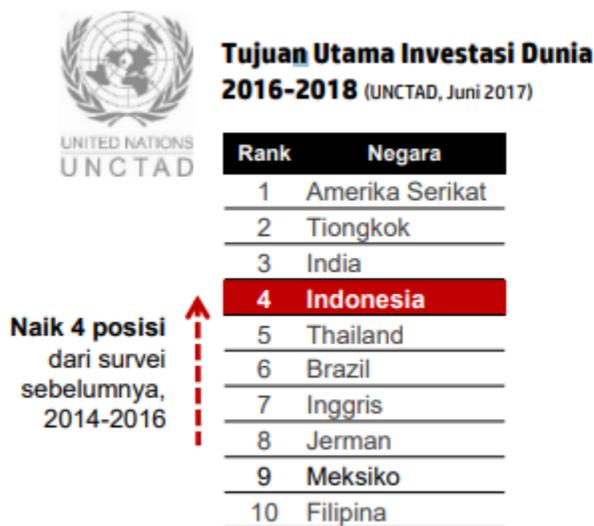
berkembang dengan semangat kapitalis mereka. Salah satu dampak dari masuknya globalisasi di level lokal adalah kebijakan desentralisasi yang terjadi pada tahun 1999. Hal tersebut membuka peluang baru aktor ekonomi lama bermain politik, ‘melanggengkan’ jaringan bisnis mereka di daerah, juga memindahkan *crony capitalism*. *Crony capitalism* atau kapitalisme kroni adalah istilah untuk menggambarkan ekonomi kapitalis dimana kesuksesan suatu bisnis bergantung pada seberapa dekat hubungan antara pengusaha dengan pihak pemerintah. Kapitalisme kroni sering diimplementasikan pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia yang memberikan kebijakan khusus kepada calon pengusaha. Seperti adanya pembebasan pajak, pemberian izin khusus bantuan pemerintah dan lainnya. Adapun tujuannya adalah untuk ‘melanggengkan’ kekuasaan pemerintah dengan terus memudahkan para pengusaha untuk menanamkan modalnya sebagai imbalan atas apa yang pemerintah tetapkan, yaitu dengan memudahkan urusan investasi.

C. Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing berawal dari modal yang ditanamkan oleh perusahaan asing ke sebuah perusahaan yang ada di dalam negeri. Biasanya, investasi asing dilakukan oleh negara-negara yang tergolong maju ke negara berkembang. Namun, dapat juga dilakukan dari sesama negara maju. Negara yang menerima investasi asing kemudian akan mendapat keuntungan, seperti salah satunya adalah pemugaran teknologi.

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Menurut pasal 6 UU PMA, terdapat bidang-bidang penanaman modal asing, yaitu Pelabuhan-pelabuhan; Produksi, Transmisi dan Distribusi tenaga listrik untuk umum; Telekomunikasi; Pelayaran; Penerbangan; Air minum; Kereta Api umum; Pembangkit

Tenaga Atom; dan Media massa. Indonesia menjadi urutan ke-4 sebagai tujuan utama investasi di dunia.



Gambar 2. 1 Tujuan Utama Investasi Dunia 2015-2017

Sumber: <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2017/10/BKPM-3-Tahun-Pemerintahan-Jokowi-JK-1.pdf>

Dalam berinvestasi di Indonesia, investor asing harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala BKPM dalam Peraturan BKPM No.14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Izin Prinsip adalah izin yang harus dimiliki dalam berinvestasi, baik domestik maupun asing. Izin Prinsip memiliki beragam jenis, seperti Izin Prinsip Baru (izin pertama kali sebelum berinvestasi), Izin Prinsip ekspansi/perluasan (izin melakukan ekspansi perusahaan), dan Izin Prinsip Penggabungan (izin sebelum melakukan merger 2 perusahaan atau lebih). Perizinan tersebut diajukan melalui PTSP di BKPM, BPMPTSP Prov./Kab./Kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh investor asing terkait pemodal

investasi, yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), total ini belum termasuk tanah dan bangunan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran investasi asing sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari utamanya negara-negara maju. Dengan adanya investasi asing mampu meminimalisir defisit tabungan negara.

Penanaman Modal Asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu adalah³² :

1. Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI)

Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). FDI lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing langsung memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini penting diperhatikan, mengingat bahwa masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang cukup memusingkan pemerintah

2. Penanaman Modal Asing Tidak Langsung atau Investasi Portofolio Asing

Investasi portofolio Asing (Foreign Indirect Investment) investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli

³² Sitepu, R. 2016. Penanaman Modal Asing di Indonesia. Di akses di <http://repository.unpas.ac.id/12221/4/BAB%20II.pdf> pada 15 Oktober 2019.

utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.

D. Potret Kota Batam

Kota Batam adalah kota yang termasuk ke dalam bagian Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Undang-Undang ini pertama kali disahkan di Jakarta pada 25 Oktober 2002. Meskipun demikian, roda pemerintahannya secara resmi berjalan efektif per tanggal 1 Juli 2004. Adapun Kepulauan Riau mencakup³³:

1. Kota Tanjungpinang
2. Kota Batam
3. Kabupaten Karimun
4. Kabupaten Natuna
5. Kabupaten Lingga
6. Kabupaten Bintan

³³ (2010). *Media Informasi : Peluang Investasi di Provinsi Kepulauan Riau*. Batam, Kepulauan Riau, Indonesia: Kadin Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2. 2 Peta Kota Batam, Kepulauan Riau

Sumber : <https://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/geography.jsp>

Sementara, Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas-batas wilayah, yaitu³⁴ :

1. Utara dengan Vietnam dan Kamboja
2. Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
3. Barat dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
4. Timur dengan Malaysia, Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat.

Tekad yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan perekonomian nasional sangatlah tinggi, namun tetap mempertahankannya nilai-nilai budaya Melayu.

Berikut ini akan dipaparkan kondisi geografis dan struktur pemerintahan Kota Batam.

³⁴ Ibid. Hlm. 6

1. Kondisi Geografis

Kota Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, Indonesia yang dijadikan basis logistik minyak bumi, tepatnya di Pulau Sumbu. Selain itu, Batam juga menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB) atau *Free Trade Zone*.³⁵ Secara keseluruhan, Kota Batam terdiri sekitar 238 pulau dengan luas daratan 1.038,84 km². Total luas Kota Batam adalah 3.839,93 km², dengan 27 persen daratan dan 73 persen lautan.³⁶ Kota Batam memang terbilang sangat strategis, karena berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Jarak tempuh dari Kota Batam ke Singapura hanya 45 menit, yaitu sekitar 20 km atau 12,5 mil laut dengan kemudahan aksesibilitas ke negara lain di seluruh dunia.

Secara kondisi geologis, pulau-pulau yang tersebar umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetakan dari daratan pratesier yang membentang dari semenanjung Malaysia dibagian Utara hingga Pulau Moro, Kundur dan Karimun bagian Selatan.³⁷ Permukaan tanah Kota Batam digolongkan datar dengan variasi berbukit yang ketinggiannya mencapai maksimum 160 meter diatas permukaan laut.³⁸

Namun, sumber daya alam yang terbatas membuat Kota Batam tidak dapat mengandalkan sepenuhnya sumber daya alam tersebut. sehingga, pembangunan Kota Batam bergantung pada pembangunan

³⁵ Ibid. Hlm 33

³⁶ BPS Kota Batam. (2015). *Statistik Daerah Kota Batam 2015*. Batam: Badan Pusat Statistik Kota Bata., Hlm. 1

³⁷ Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Op. Cit. Hlm. 35

³⁸ Ibid. Hlm. 35.

infrastruktur yang memegang peran penting dalam pembangunan kawasan.³⁹

Iklim wilayah Kota Batam adalah tropis dengan suhu minimum sekitar 20,4° - 23° C dan suhu maksimum sepanjang tahun adalah berkisar antara 30,4° - 33° C, sedangkan tekanan udara minimum 1005,6 MBS dan maksimum 1013,8 MBS. Kecepatan angin maksimum hari hujan rata-rata perbulan 15 hari, dengan rata-rata cerah hujan perbulannya 154,4 m. Kelembaban udara di wilayah Kota Batam rata-rata adalah 19% hingga 78%.⁴⁰

Pada dasarnya, konsep pengembangan Kota Batam sebagai daerah industri mengandalkan letak geografis yang strategis dengan negara tetangga, yaitu Singapura yang merupakan salah satu kawasan lintas pelayaran tersibuk di dunia. Potensi tersebut mengarahkan Batam untuk lebih mengembangkan Kota Batam ke sektor industri pengolahan, alih kapal, penumpukan logistik serta pariwisata. Dalam mempertahankan iklim investasi asing yang kondusif, pembangunan infrastruktur di Batam juga menjadi salah satu yang sangat diperhatikan.⁴¹

2. Kondisi Demografis

Secara Garis-Garis Besar Haluan Negara, besarnya jumlah penduduk dengan berkualitas baik pada suatu pulau atau daerah menjadikannya modal dasar efektif bagi pembangunan nasional. Namun, pesatnya pertumbuhan penduduk tidak mudah untuk meningkatkan pula kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, program

³⁹ Batam Industrial Development Authority. (n.d). Batam : 32 Years Development. Batam, Kepulauan Riau, Indonesia: Batam Industrial Development Authority.

⁴⁰ Profil Batam, 2012, h.15.

⁴¹ Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Op. Cit. Hlm. 38.

kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan.⁴²

Ras Melayu adalah khas dari penduduk Kota Batam, selain sekitar Kepulauan Riau. Sehingga. Penduduk pribumi dapat dikatakan tidak cukup banyak. Namun, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan sejak Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah Industri, Perdagangan Alih Kapal dan Pariwisata, serta dengan terbentuknya Kotamadya 24 Desember 1983. Setiap tahun, jumlah penduduk di Batam terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan arus mobilisasi yang begitu pesat dari luar kota Batam. Orang-orang dari luar Batam berdatangan ke Batam dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup, karena Batam tengah berkembang menjadi kota metropolitan. Banyak terdapat perusahaan asing yang berdiri dalam beragam sektor, tidak hanya industri manufaktur, namun juga pariwisata.

Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Batam dari tahun 2015-2017.⁴³

⁴²Kondisi Demografi Kota Batam. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7893/7/BAB%20IV.pdf> diakses pada 6 Oktober 2019

⁴³ Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 38



Gambar 2. 3 Pertumbuhan Penduduk Kota Batam tahun 2015-2017

Sumber : *BIFZA Development Progress of Batam*

Berdasarkan *Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) Development Progrees of Batam* tahun 2018 dari Pemerintah Kota Batam mencatat bahwa sampai dengan Desember 2017 penduduk di Kota Batam menurut Jenis Kelamin, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 543,773 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 520,168 dengan total keseluruhannya 1,063,941 jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk yang akan memadati Kota Batam akan terus bertambah setiap tahunnya.

3. Struktur Pemerintahan

Sesuai dengan KEPRES No.7 Tahun 1984, pasal 2⁴⁴, Kota Batam dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang berfungsi sebagai pemimpin, serta bertugas untuk membina kehidupan masyarakat setempat dalam segala bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Kota Batam. Berdasarkan KEPRES No.41 Tahun 1973,

⁴⁴ SKPD Pemerintah Kota Batam. (n.d.). *Sejarah Pemerintahan Kota Batam*. Retrived October 10, 2019, from Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam: <http://skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/>

pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintahan yang bernama Otorita Pengembangan Industri Kota Batam, atau yang saat ini dikenal sebagai Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam)⁴⁵.

Tabel 2. 1 Nama, Luas, Wilayah Perkecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	NAMA KECAMATAN	JMLH KELURAHAN	LUAS WILAYAH ADMINISTRASI		LUAS TERBANGUN	
			Ha	Thd	Ha	Thd
1	Belakang Padang	6	76,778.44	18.00	4,402	8.9669
2	Batu Ampar	4	4,541.63	1.06	632	1.2873
3	Bengkong	4	1,942.48	0,46	938	1.9106
4	Lubuk Baja	5	3,960.61	0.93	450	0.9166
5	Batam Kota	6	4,629.53	1.09	2,352	4.7908
6	Sei Beduk	4	12,098.78	2.84	1,379	3.5422
7	Nongsa	4	32,589.55	7.64	5,554	11.3130
8	Sekupang	7	10,721.42	2.51	2,113	4.3040
9	Sagulung	6	6,429.99	1.51	3,579	7.2901
10	Batu Aji	6	6,236.77	1.46	2,119	4.3162
11	Bulang	4	46,029.11	10.79	8,967	18.2650
12	Galang	8	220,604.97	51.72	16,249	33.0977
Total		64	426,563.28	100.00	49,094	100

Sumber : Peta Ranperda RTRW Kota Batam 2011-2013

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 terjadi perkembangan wilayah menjadi 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

E. Potensi dan Peluang Investasi di Kota Batam

Dalam rangka mengembangkan Kota Batam sebagai daerah industri yang kemudian menjadikannya tujuan investasi, maka konsep-konsep dan pemikiran B.J Habibie diterapkan dengan penyusunan strategi. B.J Habibie yang kala itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Soeharto ditugaskan untuk membangun Batam sesuai dengan

⁴⁵ *Sejarah Batam*. (n.d). Retrived October 10, 2019, from BP Batam: http://www.bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_history.jsp

harapan dan cita-citanya dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan daerah industri Kota Batam (1978-1998) dengan sebutan saat ini adalah BP Batam.

Tidak hanya sekedar basis logistik pertamina, Habibie juga mengubah arah pembangunan Batam menjadi proyek nasional yang memberikan nilai tambah tinggi guna kepentingan nasional yang menjadikan Kota Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur juga dipersiapkan Habibie dengan material unggul, mengadakan promosi dan kerjasama luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Batam, membangun prasarana dan sarana yang mendukung dan menarik bagi para investor asing untuk berinvestasi, pembentukan pemerintah kotamadya administratif Kota Batam pun digagasnya dalam upaya pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang jumlahnya terus meningkat.

Agar tujuan pengembangan Batam dapat tercapai, maka perlu ditetapkan tujuan pengembangan Batam dengan membuat pedoman RKDTR 1979-2004 Pulau Batam.

1. Tujuan Pengembangan⁴⁶

Secara konsepsional, pengembangan Pulau Batam ditujukan untuk pemerataan pembangunan nasional, yang akan menciptakan keadilan sosial, peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Sejalan dengan tugas BP Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 dengan status sebagai Bonded Area, BP Batam menetapkan fungsi Pembangunan Batam sebagai berikut.

⁴⁶ Badan Pengusahaan Batam. 2014. Mengungkap Fakta Pembangunan Batam: Era J.E Habibie – Ismeth Abdullah – Mustofa Widjaja. BP Batam. Hlm.28

a. Fungsi Wilayah Bonded⁴⁷

Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Pasal 7, adalah dasar pengembangan Batam sebagai Daerah Bonded. Dalam KEPRES tersebut menyebutkan bahwa jika kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri perlu dilakukan atas usul BP Batam, wilayah-wilayah tertentu di dalam daerah industri Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1972.

b. Fungsi Wilayah Alih Kapal (Transshipment)⁴⁸

Hal yang melatarbelakangi fungsi Batam sebagai transshipment adalah karena letak Batam yang sangat strategis pada jalur perdagangan dunia. Dengan adanya fungsi ini, mampu menjadikan Batam lancar dalam usahanya meningkatkan perdagangan luar negeri dan melancarkan arus kegiatan bongkar muat barang dalam rangka menunjang pembangunan daerah industri Batam.

c. Fungsi Batam sebagai Logistic Base⁴⁹

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1970 tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam, salah satu fungsi yang disebutkan, antara lain seperti fungsi Batam sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi, yang berkaitan dengan eksploitasi. Hingga saat ini, fungsi Batam sebagai basis logistik diperluas. Batam juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pergudangan bagi produk ekspor dan barang impor Indonesia.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid. Hm. 29

⁴⁹ Ibid.

d. Fungsi Batam sebagai Daerah Industri⁵⁰

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1971 adalah keputusan yang menyatakan bahwa Batam pertama kali ditetapkan sebagai daerah industri. Pada tahun 1973, peraturan tersebut ditinjau kembali guna meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian, dilanjutkan dengan penegasan kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 bahwa seluruh Batam merupakan industri, utamanya yang bertujuan ekspor.

e. Fungsi Batam sebagai Daerah Wisata⁵¹

Batam menjalankan fungsinya sebagai daerah wisata. Pembangunan infrastruktur, seperti hotel berbintang, resort, dan lapangan golf terus dibangun guna memenuhi kebutuhan penginapan dan hiburan bagi wisatawan. Sehingga, Batam menjadi tujuan wisata, utamanya bagi wisatawan asing. Pada tanggal 9 Maret 1983 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata menetapkan pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam sebagai gerbang masuk wisatawan dari luar negeri.

F. Investasi Asing di Batam

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing. Sejak ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia, kegiatan penanaman modal pun dimulai. Negara-negara maju

⁵⁰ Ibid. Hlm.30

⁵¹ Ibid.

gencar melakukan penanaman modal awal dan ekspansi penanaman modal ke Indonesia. Hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Indonesia sebagai negara berkembang dalam mempercepat pembangunan. Sebagaimana yang diketahui bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu aspek pembangunan. Indonesia, adalah negara tujuan investor asing yang sangat potensial dalam menanamkan modalnya.

Kepulauan Riau adalah satu provinsi yang merupakan bagian dari Indonesia. Kekayaan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau begitu potensial dan menawarkan berbagai peluang investasi yang sangat luas, domestik maupun asing dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Calon pelaku usaha juga diberikan insentif khusus dengan beragam fasilitas, seperti pajak, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan perbankan, utamanya bagi investasi baru calon pelaku usaha asing dalam Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Kota Batam yang dibangun dan dikembangkan menjadi wilayah industri mampu menjadikannya sasaran investasi bagi para pelaku usaha. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang mendukung kemudahan bagi investor asing dalam menanamkan modalnya. Posisi Batam yang strategis dan pembangunan yang telah lama dilakukan adalah potensi pengembangan perekonomian Batam. Kebijakan *Free Trade Zone* yang diberlakukan di kawasan-kawasan tertentu di Kepulauan Riau, termasuk Batam, memungkinkan hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan. Dijadikannya Batam sebagai *Free Trade Zone* merupakan upaya legitimasi baru bagi Pulau Batam untuk meneruskan fungsinya sebagai daerah industri berstandar internasional. Manfaat dari adanya pasar bebas ini akan bermanfaat bagi arus perdagangan yang lebih lancar, lebih luas pasarnya serta skala ekonomi yang sedemikian besar dalam

jangka panjang. Dengan demikian, hal ini akan menghasilkan alokasi sumber daya rasional dengan peningkatan efisiensi.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan Batam adalah salah satu kota yang menjadi bagiannya. Berdasarkan kedua bentuk investasi yang dapat dilakukan Indonesia, investasi yang digunakan di Batam adalah Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) karena lebih memiliki pengaruh untuk jangka panjang dan dapat langsung memberikan andil terhadap pembangunan Batam dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi serta mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membuat kehidupan lebih sejahtera. Selain itu, FDI yang diberlakukan di Batam memiliki manfaat lain, seperti adanya alih teknologi yang dilakukan oleh negara maju. Sehingga, tenaga kerja asal Indonesia mampu mengoperasikan teknologi yang dibawa dan perlahan pengetahuan yang diperoleh berguna untuk mengembangkan industri di tanah air. Mengingat Batam juga dikenal sebagai Pulau Industri di Indonesia.

Terdapat banyak sekali peluang bagi Kota Batam dalam memanfaatkan posisinya yang strategis dengan berada dekat dengan Singapura dan berada pada jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Sehingga, Batam mampu menampung investor asing yang lahan nya terbatas di Singapura dalam mengembangkan industri nya.

1. Sektor Industri

Dengan letak geografis yang strategis, salah satu pengembangan Kota Batam adalah dengan diarahkannya pada sektor industri. Pembangunan Daerah Industri Kota Batam tidak bertujuan untuk menyaingi Singapura. Hal ini dilakukan agar kerja sama regional yang saling menguntungkan dan saling mengisi antar kedua belah

pihak dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, industri, jasa telekomunikasi dan kegiatan lainnya.

Berkembangnya industri dan investasi di Batam secara pesat, beriringan pula dengan bertambahnya kawasan industri baru yang menjadi pusat pertumbuhan industri di Batam.

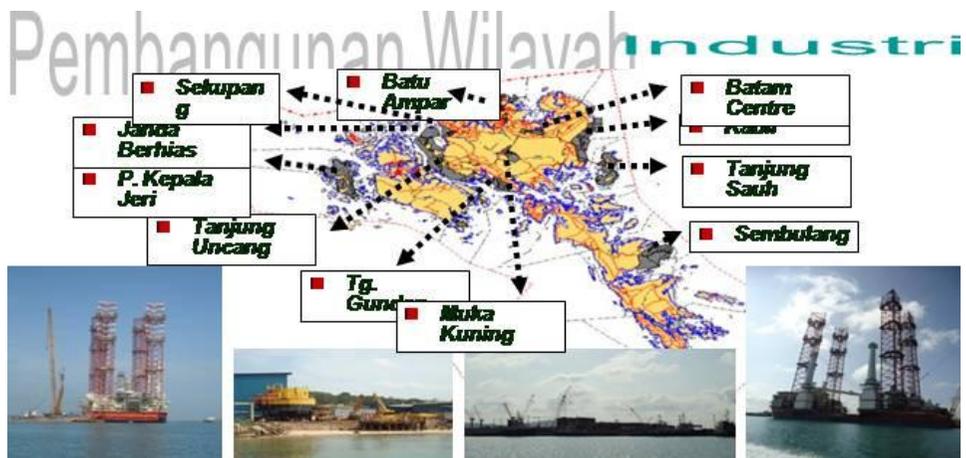
Hingga akhir tahun 2017, terdapat 22 kawasan industri yang tersebar di beberapa lokasi di Batam. Berikut adalah tabel nama-nama kawasan industri di Kota Batam.⁵²

Tabel 2. 2 Daftar Kawasan Industri

No	Industrial Estates	Company / Owner	Tenant
1	Batamindo Industrial Estate	PT. Batamindo Investment Co.	66
2	Bintang Industrial Park II	PT. Bintang Propertindo	57
3	Cammo Industrial Park	PT. Aman Sejati Propertindo	29
4	Citra Buana Center Park I	PT. Citra Buana Prakarsa	41
5	Citra Buana Center Park II	PT. Citra Buana Batam	7
6	Citra Buana Center Park III	PT. Citra Buana Prakarsa	23
7	Excecutive Industrial Park	PT. Bumi Abadi Tegar Sakti	40
8	Hijrah Industrial Park	Wang Jong/Sani	21
9	Indah Industrial Park	PT. Teluk Pantaian Indah	9
10	Kabil Integrated Industrial Park	PT. Kabil Indonusa Estate	34
11	Kara Industrial Park	Chandra Lukito	35
12	Lytech Industrial Park	Chandra Lukito	78
13	Latrade Industrial Park	Latrade PTE LTD	12
14	Malindo Citra Perkasa Industrial Park	PT. Malindo Citra Perkasa	37
15	Mega Cipta Perkasa Industrial Park	PT Mega Cipta Adi Persada	59
16	Panbil Industrial Estate	PT. Nusantara Properta Panbil	26
17	Puri Industrial Park 2000	PT. Teluk Pantaian Indah	36
18	Sarana Industrial Point	PT. Pratama Sarana Unggulan	34
19	Sekupang Makmur Abadi	Banyumas Saus	7
20	Taiwan Internasional Industrial Estate	PT. Suar Batam In't Dev. Co	11
21	Tunas Industrial Estate	PT. Tritunas Bangun Perkasa	230
22	Union Industrial Park	PT. Union Batam Abadi	57

Sumber : BIFZA Development Progress of Batam

⁵² Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 11



Gambar 2. 4 Peta Kawasan Industri di Batam

Sumber: <https://arsipskpd.batam.go.id>

Kawasan Industri *Batamindo Industrial Estate* adalah kawasan pertama yang menjadikannya kekuatan untuk saling melengkapi. Kawasan Batamindo yang berlokasi di Mukakuning adalah bentuk pertemuan lanjutan antara Presiden Soeharto dengan PM Singapura Lee Kuan Yew di Batam tahun 1989. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai peluang kerjasama antar kedua belah pihak dengan dibentuknya *joint venture* antara *Singapore Technologies* (perusahaan konsorsium Singapura) dan *Salim Group* (konsorium perusahaan Indonesia). Di satu sisi, Singapura dikenal memiliki jaringan luas dengan perusahaan multinasional dan lebih berpengalaman dalam mengelola industri. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki ketersediaan lahan dengan harga yang kompetitif serta tenaga kerja yang melimpah. Beroperasinya kawasan industri di Batam, perusahaan-perusahaan Singapura dan multinasional yang berbasis di Singapura dapat mengembangkan usahanya.⁵³

⁵³ Badan Pengusahaan Batam. 2014. Mengungkap Fakta Pembangunan Batam: Era J.E Habibie – Ismeth Abdullah – Mustofa Widjaja. BP Batam. Hlm.53

Pengembangan industri bagi Indonesia membuka peluang lapangan pekerjaan, mendorong peningkatan sektor ekspor, mendorong munculnya kawasan industri serupa, dan merangsang arus investasi. Dengan investasi yang semakin meningkat, maka semakin bertambah pula jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi di Batam, pengelola kawasan industri melengkapinya dengan beragam fasilitas, seperti adanya dormitori yang diperuntukkan karyawan, sarana publik, ketersediaan utilitas, jasa *maintenance* dan kemudahan akses transportasi menuju pelabuhan dan bandara.⁵⁴

Dalam sektor industri, Batam dikenal sebagai sentra industri elektronika terkemuka di Indonesia.⁵⁵ Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mempererat struktur industri elektronika di dalam negeri melalui peningkatan investasi. Industri elektronika dinilai mampu bersaing secara kompetitif di dalam maupun luar negeri. Penerapan program-program dan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik, utamanya dalam sektor industri elektronik menjadi tren positif. Kemenperin menyokong Batam menjadi pusat pengembangan industri elektronik bernilai tinggi. Hal ini dilakukan guna mendukung *Making Indonesia 4.0*, karena industri elektronika adalah satu dari lima sektor manufaktur yang kelak menjadi contoh dalam penerapan teknologi era revolusi industri keempat.⁵⁶

⁵⁴ Otorita Batam. 2006. *Profile of Industrial Estate*. Batam : Otorita Batam.

⁵⁵ Kuncoro, M. 2005. "Menanti Reformasi Iklim Bisnis Indonesia". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial-UNISLA*, No. 55/XVIII/1/2005.

⁵⁶ *SIARAN PERS*. Batam Berpotensi Jadi Pusat Klaster Industri Elektronik Bernilai Tambah Tinggi. Retrived from <https://kemenperin.go.id/artikel/19090/Batam-Berpotensi-Jadi-Pusat-Klaster-Industri-Elektronik-Bernilai-Tambah-Tinggi> October, 7 2019.

Sebagai contoh adalah di kawasan industri Batamindo dimana PT Infineon Technologies telah berdiri sejak 1999. PT ini memproduksi semikonduktor dan solusi sistem guna kebutuhan komponen elektronik bagi sektor otomotif, komunikasi dan energi. Perusahaan ini berasal dari Jerman dengan produk keunggulan yang dimilikinya adalah mikroelektronik yang diaplikasikan pada *powertrain* kendaraan efisiensi mesin listrik atau hibrida.⁵⁷ Perusahaan dengan peringkat Top 3 di dunia ini dengan beragam produknya mampu mengaplikasikan pada sistem *internet of things* , yang menjadi salah satu karakteristik teknologi industri 4.0.

2. Sektor Pariwisata

Sektor industri bukanlah satu-satunya langkah dalam memajukan pertumbuhan perekonomian Batam. Sektor pariwisata turut menjadi langkah pemerintah dalam memanfaatkan lokasi Batam yang strategis untuk menggerakkan ekonomi Batam. Di Indonesia, Batam masuk ke dalam urutan ketiga yang menjadi titik kedatangan utama wisatawan asing. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia menjadikan Batam sebagai salah satu pintu masuk. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa Batam menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 35



Gambar 2. 5 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk tahun 2015-2017

Sumber : BIFZA Development Progress of Batam

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa pertumbuhan Batam tidak hanya berasal dari industri elektronika, pariwisata turut menjadi industri yang membanggakan di Batam. Wisatawan mancanegara yang kerap mengunjungi Batam adalah dari negara tetangga, yaitu Singapura, kemudian disusul oleh negara-negara lain, seperti Japan, Malaysia, Australia, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, Inggris, dan lainnya. Berikut adalah grafik yang menunjukkan kunjungan wisatawan asing ke Batam.⁵⁹



Gambar 2. 6 Daftar Kunjungan Wisatawan Asing tahun 2015-2017

Sumber : BIFZA Development Progress of Batam

⁵⁹ Ibid.

Di tahun 2015, jumlah wisawatan yang mengunjungi Batam mencapai 765.444 pengunjung dengan rata-rata lebih dari 121.175 orang per bulan ; di tahun 2016, jumlah wisatawan mencapai 1.432.472 pengunjung dengan rata-rata lebih dari 119.372 orang per bulan; dan di tahun 2017, jumlah wisawatawan meningkat menjadi 1.504.275 dengan rata-rata lebih dari 125.356 orang per bulan.⁶⁰

Terdapat 70 hotel dan *resort* , 6 lapangan golf bertaraf internasional dan 2 *marinas* yang merupakan aktifitas akhir pekan favorit bagi wisatawan. Restoran “kelong” tradisional di pantai menyajikan beragam *seafood* segar. Perbelanjaan murah menawarkan produk mulai dari kerajinan tangan tradisional hingga barang bermerek internasional. Pulau-pulau tambahan yang menghubungkan pulau di sekitar Batam, yaitu Rempang dan Galang yang sangat cocok untuk pariwisata dan investasi karena memiliki pemandangan yang indah, pantai yang bagus dan juga terumbu karang yang menakjubkan. Kapal pesiar berkeliling mengitari pulau-pulau tersebut adalah salah satu atraksi yang potensial. Pulau Rempang menyimpan sejarah yang signifikan dimana paska sekutu memenjarakan tawanan perang Jepang yang ditangka di akhir Perang Dunia II. Pulau Galang terkenal dengan *best refuges camp* yang dinobatkan oleh PBB dan pernah menjadi tempat pengungsian orang-orang Vietnam yang melarikan diri ke Indonesia di tahun 1979-1996. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara.

Sejumlah program prioritas pengembangan potensi pariwisata yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, hotel dan restoran berkelas internasional,

⁶⁰ Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV.

dengan bekerjasama di sektor pariwisata. Misalnya, dengan memperkenalkan objek wisata yang menjadi daya tarik di Batam. Upaya dalam meningkatkan jumlah investor, utamanya dalam sektor pariwisata adalah dengan terus mengembangkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana sektor pariwisata di Batam. Calon investor asing akan melirik Batam untuk dijadikan tujuan investasi bila perkembangan pariwisata Batam terus berkembang.

G. Peran Badan Pengusahaan Batam dalam Meningkatkan Investasi Asing di Batam

Dalam hal investasi, BP Batam memiliki wewenang untuk mengatur investasi asing di Batam. BP Batam adalah badan otoritas pengembangan Batam, utamanya perihal investasi di Batam. BP Batam berkedudukan sebagai perwakilan BKPM Pusat dalam mengatur pelayanan perizinan investasi asing di Batam.

1. Landasan Hukum BP Batam⁶¹

- a. Undang – Undang No. 26, 2007
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725
- b. Undang – Undang RI No.44, 2007
Penetapan Perpu No.1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No.36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

⁶¹ Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 04

- c. Peraturan Pemerintah No.46, 2007
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipan, Pulau Repang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.
- d. Peraturan Pemerintah No.5, 2011
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- e. KEPRES No.9, 2008
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- f. KEPMEN Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional No.9, 2008
Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- g. Instruksi Presiden No.3, 2003
Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- h. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam No.3, 2008
Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.3 Tahun 2008 Tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

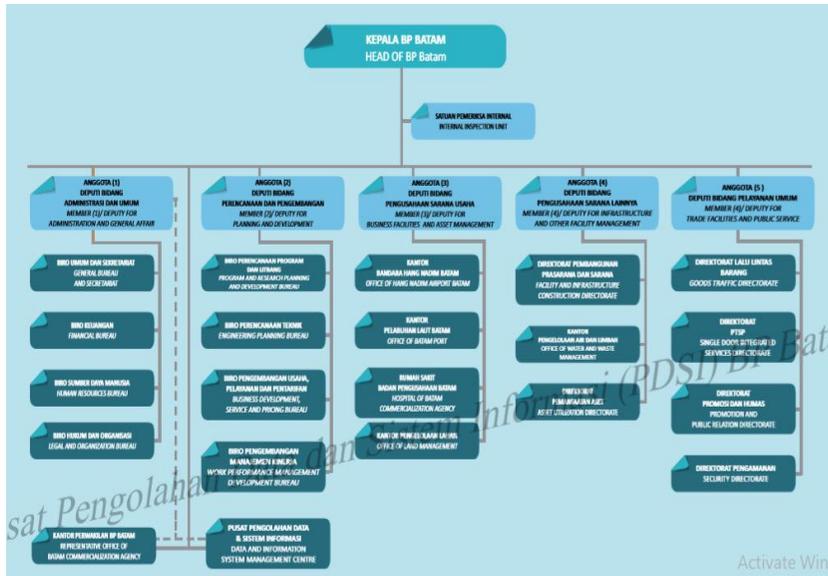
- i. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- j. Peraturan Kepala BP Batam No. 4, 2010
Kepegawaian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- k. Peraturan Kepala BP Batam No.5, 2015
Struktur Organisasi dan Tata Kerja

2. Struktur Organisasi BP Batam

Adapun Visi dari Badan Pengusahaan Batam adalah Mewujudkan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara, sedangkan Misi Badan Pengusahaan Batam adalah (1) Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang Profesional, (2) Mewujudkan Kawasan Investasi yang Memiliki Infrastruktur yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) Mewujudkan Kawasan Investasi yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam struktur organisasinya, Badan Pengusahaan Batam dipimpin oleh seorang Kepala. Di bawahnya, terdiri dari lima (5) anggota atau deputi yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai bidang yang telah ditetapkan. Berikut adalah struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam.⁶²

⁶² Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority BP Batam. Tahun 2018. Edisi II Vol. XXXIV. Hlm. 06



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi BP Batam

Sumber : BIFZA Development Progress of Batam

Anggota 1 adalah Deputi Bidang Administrasi dan Umum; Anggota 2 adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan; Anggota 3 adalah Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha; Anggota 4 adalah Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya; dan Anggota 5 adalah Deputi Bidang Pelayanan Umum. Masing-masing Anggota memiliki Direktoratnnya.

Dalam menarik investasi asing ke Batam, Badan Pengusahaan Batam adalah sarana bagi para calon investor asing dalam mengurus segala peraturan dan perizinan investasi di Batam. Anggota 5 dalam struktur organisasi BP Batam, yaitu Deputi bidang Pelayanan Umum yang terdiri dari Direktorat Lalu Lintas Barang, Direktorat PTSP, Direktorat Promosi dan Humas serta Direktorat Pengamanan adalah bagian-bagian yang mengurus perihal investasi di Batam. Tugas dan fungsi masing-masing nya adalah sebagai berikut :

- a. Direktorat Lalu Lintas Barang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian layanan industri, perdagangan serta melakukan monitoring dan pelaporan perdagangan dan industri di wilayah kerja BP Batam; fungsi direktorat ini salah satunya adalah pelaksanaan pembinaan dan pemberian layanan usaha dibidang perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Direktorat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bertugas melayani terkait perizinan investasi.
- c. Direktorat Promosi bertugas untuk mempromosikan Batam dengan menjalin hubungan dengan investor asing, menarik investor, mempromosikan ke luar negeri. Sedangkan Humas (hubungan masyarakat) lebih cenderung ke dalam negeri, seperti menjalin hubungan dengan masyarakat dalam negeri, memberitahukan atau menginformasikan kegiatan BP kepada masyarakat. Dengan demikian, direktorat promosi lebih ke luar negeri, sedangkan humas lebih kepada dalam negeri.
- d. Direktorat Pengamanan bertugas mengalihkan izin aset dan wilayah kerja BP Batam.

3. Peran BP Batam Meningkatkan Investasi Asing di Batam

Peran Direktorat Promosi dan Humas BP Batam, utamanya Promosi cenderung menarik investor asing ke Batam dengan berbagai macam cara sesuai arahan dan keputusan pimpinan BP Batam.

Berdasarkan wawancara anatara penulis dengan narasumber, yaitu Bapak Sofyan, S.E , M.Si. selaku Kepala Seksi (KaSi)

Pelaksana Promosi⁶³ mengatakan bahwa upaya menarik investor asing dilakukan dengan tiga (3) cara :

- a. Direktorat Promosi BP Batam mengadakan beberapa pameran di Luar Negeri. Selama mengadakan pameran di Luar Negeri, Direktorat Promosi BP Batam ikut kepada kegiatan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
- b. Bekerja sama dengan BKPM dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Event* yang biasanya Direktorat Promosi BP Batam lakukan adalah target marketing . Dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang dianggap cocok dalam studi kelayakan dalam melakukan investasi. Dalam melakukan *event* ini, Direktorat Promosi BP Batam mengikutsertakan Kepala BP Batam.
- c. Seminar yang rutin di adakan bulan Oktober di Bali. Seminar ini diadakan oleh Majalah *Bloomberg* (majalah yang menerbitkan artikel tentang bisnis dan finansial), Inggris dengan mendatangkan 200 orang CEO perusahaan besar dan Direktorat Promosi BP Batam diminta untuk mempresentasikan tentang Batam.

Dalam menarik investor asing, BP Batam melakukan pemetaan wilayah promosi investasi dengan menyusun Peta Promosi yang terdiri dari empat benua. Hal ini dilakukan agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.⁶⁴

⁶³ Sofyan, S.E , M.Si. Kepala Seksi Pelaksana Promosi BP Batam. Menjadi pegawai negeri di BP Batam sejak tahun 1997 dan telah menduduki 3 jabatan hingga 2018, yaitu Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Humas, dan Kepala Seksi Promosi .

⁶⁴ Badan Pengusahaan Batam. 2014. *Mengungkap Fakta Pembangunan Batam: Era B.J Habibie*. BP Batam. Hlm. 65-69

a. Benua Asia⁶⁵

Benua ini adalah tujuan promosi primadona. Hal ini dikarenakan Benua Asia ditempati oleh negar-negara yang potensial di bidang ekonomi yang sedang mengembangkan ekonominya.

1) Singapura

Langkahnya adalah dengan Penunjukkan perwakilan di Singapura ; Bekerja sama dengan berbagai institusi di Singapura, seperti Singapore Confederation of Industries (SCI), Nanyang Polytechnic of Singapore, dan Alexandra Hospital ; seminar dan promosi.

2) Jepang

Sebagai penghubung antara BP Batam dengan para investor Jepang, maka pada thun 2000 didirikanlah kantor perwakilan Jepang dan menunjuk warga negara Jepang ; Kemudian, ditahun berikutnya BP Batam bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) dan JETRO (Japan External Trade Organization) untuk mendapatkan asistensi tenaga ahli Jepang guna menarik para investor baru dari Jepang; menjalankan beberapa kerjasama bisnis, seperti Japan Chamber of Commerce and Industry, Asosiasi Konsultan Tokyo, dan Perusahaan TOMOE ; dan mengikuti beberapa seminar.

3) Malaysia

BP Batam menjalin kerjasama melalui penandatanganan kerjasama, seperti dengan Malaysia International Chamber of

⁶⁵ Ibid. Hlm. 65

Commerce and Industry, Labtech VSS System Malaysia ; penyelenggaraan seminar investasi.

b. Benua Eropa⁶⁶

Beberapa kerjasama yang dilakukan BP Batam dengan Benua Eropa, seperti dengan Berlin Indonesia Business Council dan Investment and Trade Development Agency Hungaria. Selain itu, kegiatan seminar dan pameran juga gencar dilakukan, seperti Seminar Promosi Investasi dengan Berlin Indonesia Business Council di Frankfurt dan Indonesia-Netherlands Associations (INA) Rotterdam, Belanda, dan seminar German Asia Business Circle serta EKONID AHK Jerman.

Upaya BP Batam tersebut membuahkan hasil, diantaranya adanya kunjungan-kunjungan pengusaha Eropa yang semakin meningkat di Batam. Seperti, kunjungan dari anggota EKONID Jerman dan Advisory Services in Environmental Management (ASEM) guna mengimplementasikan *Pilot Project Business Technology Centre*. Beberapa perusahaan multinasional Eropa mulai berdatangan, seperti Siemen (Jerman), Schneider (Prancis) dan Phillips (Belanda).

c. Benua Australia⁶⁷

Kerjasama antara Benua Australia dan BP Batam sudah terjalin sejak 2004 dengan beberapa asosiasi terkemuka, seperti Australia Indonesia Business Council dan Australia Chamber of Commerce and Industry. Dimulai dengan adanya pelaksanaan seminar dan misi investasi. Dari sanalah, para pengusaha Australia mulai berkunjung untuk melihat secara langsung

⁶⁶ Ibid. Hlm. 67

⁶⁷ Ibid.

mengenai peluan dan potensi yang Batam miliki. Hingga saat ini, lebih dari 20 perusahaan multinasional Australia yang beroperasi di Batam, seperti ProFab dan Halco.

d. Benua Amerika⁶⁸

Sebagaimana halnya yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara adikuasa di dunia, dan negara ini menjadi salah satu sasaran promosi BP Batam. BP Batam percaya bahwa dengan menjadikan negara AS sebagai sasaran promosi investasi dapat meningkatkan kredibilitas Batam sebagai destinasi investasi di Asia Tenggara. Ditunjuknya staf ahli dari Amerika Serikat diharapkan mampu menjadi penghubung terjalannya hubungan BP Batam dengan sejumlah afiliasi dan asosiasi dari Amerika Serikat, seperti dengan United States Commercial Centre, United States-Indonesia Society (USINDO), American Chamber of Commerce, dan USAID (US Agency for International Development).

Dalam menarik investor dari AS, kegiatan seminar serta kunjungan pengusaha AS terus ada dan bahkan meningkat. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 12 perusahaan multinasional AS yang beroperasi di Batam, salah satu yang terbesar adalah McDermott.

e. Timur Tengah⁶⁹

BP Batam menjalin hubungan dengan duta-duta besar dari negara-negara di Timur Tengah sejak 2002, seperti Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Tunisia, dan Mesir. Dari sanalah bermula kunjungan demi kunjungan para duta besar dan pengusaha asal Timur Tengah pun meningkat.

⁶⁸ Ibid. Hlm. 68

⁶⁹ Ibid.

Kerjasama yang terjalin antara BP Batam dengan negara-negara tersebut terus membaik, seperti dengan Kish Free Zone Organization (KFZO) dalam bidang perdagangan, industri, pariwisata dan promosi serta bertukar informasi antar keduanya. Kemudian, ada kerjasama lainnya seperti dengan AEGEAN Free Zone Development and Operating Company in Turkey (ESBAS) dalam bidang industri dan perdagangan.

f. Indonesia

Tak hanya dengan luar negeri, berbagai pameran juga diselenggarakan, misalnya menjalin kerjasama dengan salah satu kementerian yang berpusat di Jakarta, seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kegiatan promosi investasi harus dilaksanakan secara penuh, baik internal maupun eksternal. Sehingga, segala aspek investasi perlu mulai dibenahi sebelum melaksanakan promosi eksternal.